

Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Pengangguran Bagi Pendapatan Nasional dan Inflasi

Mutiara Suhada Tanjung¹, Hendra Riofita²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mutiarasahada03@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Mei April 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juni 2026

Kata Kunci

Kebijakan Moneter, Fiskal, Pengangguran, Pendapatan Nasional, Inflasi

Keywords

Monetary Policy, Fiscal Policy, Unemployment, National Income, Inflation



ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan moneter dan fiskal memengaruhi tingkat pengangguran dan bagaimana pengaruhnya terhadap hiperinflasi dan pendapatan nasional. Proses yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yang melibatkan pemeriksaan berbagai materi yang relevan dengan subjek makroekonomi, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan makalah penelitian. Untuk memahami hubungan antar variabel yang diteliti, digunakan analisis deskriptif data sekunder. Temuan diskusi menunjukkan bahwa, melalui mekanisme transmisi ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal secara signifikan memengaruhi tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, namun berpotensi meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk memaksimalkan pencapaian stabilitas ekonomi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Kesimpulannya, kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dan terkoordinasi mampu menekan pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga stabilitas inflasi dalam perekonomian.

The purpose of this research is to examine how monetary and fiscal policies affect unemployment and how they affect inflation and national GDP. This study's methodology involves an evaluation of a variety of materials, including books, scientific journals, and research papers that are pertinent to macroeconomic issues. In order to comprehend the correlations between the variables under study, descriptive analysis of secondary data was employed. The findings demonstrate that through economic transmission mechanisms, monetary and fiscal policies have a major impact on unemployment. A decrease in unemployment contributes to an increase in national income but may lead to higher inflation in the short term. Conversely, inappropriate policies can worsen unemployment conditions and hinder economic growth. To attain the best possible economic stability, monetary and fiscal policy must be coordinated. In conclusion, well-designed and coordinated monetary and fiscal policies can reduce unemployment, increase national income, and maintain inflation stability in the economy.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Mutiara Suhada Tanjung et al (2026) Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Pengangguran Bagi Pendapatan Nasional dan Inflasi <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah stabilitas ekonomi. Kondisi makroekonomi yang terkendali, seperti inflasi yang stabil, pengangguran rendah, dan peningkatan pendapatan nasional yang stabil, biasanya mencerminkan

stabilitas ini. Ketika menilai kinerja ekonomi suatu negara, ketiga metrik ini terkait erat. Meskipun pengangguran yang parah dapat menghambat peningkatan kesejahteraan dan memperburuk ketidaksetaraan pendapatan, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, peningkatan pendapatan nasional menjadi indikator penting dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi (Riofita, 2015).

Dalam praktiknya, perekonomian suatu negara tidak selalu berada dalam kondisi yang stabil. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kondisi global, krisis ekonomi, serta dinamika kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi potensi dampak negatif dari berbagai guncangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang efektif dan terfokus (Jalil et al., 2024).

Dua instrumen utama pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi adalah kebijakan fiskal dan moneter. Bank sentral menjalankan kebijakan moneter, yang berpusat pada pengelolaan suku bunga dan jumlah uang beredar. Mempertahankan stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah tujuan dasar kebijakan moneter. Bank sentral dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk investasi, konsumsi, dan inflasi, menggunakan berbagai instrumen termasuk persyaratan cadangan minimum, operasi pasar terbuka, dan suku bunga acuan.

Kebijakan fiskal, di sisi lain, berkaitan dengan bagaimana anggaran negara dikelola, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Melalui pengeluaran publik dan kebijakan perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk memengaruhi permintaan agregat. Meningkatkan pengeluaran pemerintah atau memotong pajak adalah contoh kebijakan fiskal ekspansif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran. Namun, jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan batasan yang sesuai, hal itu berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraktif berisiko mengurangi pembangunan ekonomi dan meningkatkan pengangguran meskipun dapat membantu mengurangi inflasi.

Inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat pengangguran semuanya terkait erat dengan kebijakan moneter dan fiskal. Pendapatan masyarakat sering kali meningkat ketika tingkat pengangguran menurun, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional. Namun, inflasi juga dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan yang berlebihan. Dalam situasi ini, perencanaan kebijakan moneter dan fiskal yang cermat diperlukan untuk mencapai kompromi antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Nasution et al., 2025).

Selain itu, terdapat hubungan teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara inflasi dan pengangguran, seperti konsep *kurva Phillips*, yang menunjukkan adanya *trade-off* antara keduanya dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan pengangguran melalui kebijakan ekspansif dapat berpotensi meningkatkan inflasi. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa dampaknya saling menguntungkan dan mencegah inkonsistensi dalam mencapai tujuan ekonomi, diperlukan koordinasi yang efektif antara kebijakan moneter dan fiskal.

Keadaan struktural ekonomi, kemampuan kelembagaan, dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap kebijakan yang diterapkan semuanya berdampak pada efektivitas kebijakan moneter dan fiskal di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Faktor-faktor seperti tingkat konsumsi masyarakat, investasi, stabilitas sektor keuangan, serta kondisi global juga turut menentukan keberhasilan kebijakan dalam menekan pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan ini berfungsi dalam situasi tertentu, diperlukan analisis yang menyeluruh.

Penelitian oleh (Pandiangan et al., 2026) menyatakan bahwa kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi dan pengangguran melalui perubahan suku bunga, di mana kebijakan ekspansif dapat menurunkan pengangguran namun berpotensi meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Sementara itu, (Setiowati & Nugroho, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, meskipun berisiko meningkatkan defisit anggaran dan inflasi. Selain itu, penelitian (Adzam et al., 2025) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal cenderung lebih efektif dalam menurunkan pengangguran dalam jangka pendek dibandingkan kebijakan moneter, karena dampaknya yang langsung terhadap permintaan agregat. Namun, stabilitas harga jangka panjang masih sangat bergantung pada kebijakan moneter. Temuan penelitian yang saling bertentangan ini menunjukkan bahwa struktur pasar, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta kondisi ekonomi semuanya

memiliki dampak besar pada efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu kebijakan yang bersifat universal, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang spesifik (Riofita, 2024).

Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan moneter dan fiskal memengaruhi tingkat pengangguran dan bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi dan pendapatan nasional. Diharapkan penelitian ini akan memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan membantu para pembuat kebijakan mengembangkan langkah-langkah yang akan mengarah pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Studi ini mengkaji dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran dan konsekuensinya terhadap inflasi dan pendapatan nasional menggunakan metode tinjauan pustaka. Pendekatan tinjauan pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dengan meninjau berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan isu penelitian. Data sekunder dari berbagai sumber, termasuk artikel akademis, laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku teks makroekonomi, dan publikasi resmi dari organisasi terkait yang membahas kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, pendapatan nasional, dan inflasi, digunakan dalam studi ini. Keandalan, penerapan, dan kemitakhiran data dipertimbangkan dalam pemilihan sumber. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan dan penentuan fokus kajian, yaitu hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal dengan tingkat pengangguran serta dampaknya terhadap pendapatan nasional dan inflasi. Selanjutnya, dilakukan penelusuran dan pengumpulan literatur yang sesuai dengan topik penelitian (Riofita, 2022). Literatur yang dikaji mencakup teori-teori ekonomi makro, baik yang bersifat klasik maupun modern, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Tahap berikutnya adalah analisis literatur, yaitu dengan menelaah secara kritis berbagai konsep, teori, dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel, memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter dan fiskal, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, pendapatan nasional, dan inflasi. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis dengan mengaitkan berbagai temuan dalam literatur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan dampak kebijakan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter adalah serangkaian langkah yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi lapangan kerja, nilai tukar mata uang, dan tingkat inflasi dengan menggunakan kebijakan ini sebagai senjata untuk pengendalian ekonomi (Nuraini et al., 2025). Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga daya beli, menstabilkan harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang, yang pada gilirannya memengaruhi inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bank sentral dapat memengaruhi investasi dan konsumsi, dua elemen kunci dari permintaan agregat, dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Bank sentral biasanya menurunkan jumlah uang beredar untuk mengurangi tekanan harga ketika inflasi berlebihan. Di sisi lain, bank sentral dapat memperluas jumlah uang beredar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama resesi atau periode pengangguran tinggi.

Untuk mencapai tujuan ekonomi mereka, bank sentral menggunakan berbagai alat kebijakan moneter. Alat-alat ini termasuk cadangan kas minimum, operasi pasar terbuka, dan suku bunga (Syah & Aziz, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. **Suku Bunga:** Salah satu alat penting dalam kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menurunkan investasi dan konsumsi dengan menaikkan suku bunga karena hal itu membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Inflasi biasanya ditekan dengan cara ini. Di sisi lain, penurunan suku bunga akan membuat kredit lebih mudah diakses dan mendorong investasi dan konsumsi, yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan menurunkan pengangguran.

2. Operasi Pasar Terbuka: Bank sentral membeli dan menjual aset di pasar terbuka. Pasokan uang menyusut ketika bank sentral menjual sekuritas, yang membantu mengelola inflasi. Di sisi lain, ketika bank sentral membeli sekuritas, pasokan uang tumbuh, yang dapat meningkatkan perekonomian dengan membuat pasar keuangan lebih likuid.
3. Persyaratan Cadangan: Persentase uang yang wajib disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral dikenal sebagai persyaratan cadangan. Bank sentral menurunkan jumlah uang beredar dan menekan inflasi dengan menaikkan persyaratan cadangan, yang membatasi kemampuan bank komersial untuk memberikan kredit. Sebaliknya, penurunan persyaratan cadangan memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak pinjaman, yang dapat memperluas jumlah uang beredar dan mendorong ekspansi ekonomi.

Kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi yang diterapkan pemerintah dengan mengendalikan anggaran negara, yang terdiri dari pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, transfer, dan subsidi. Untuk mencapai tujuan makroekonomi termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran, dan mengelola inflasi, kebijakan fiskal digunakan sebagai instrumen pengendalian ekonomi (Sari et al., 2024). Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa ekonomi yang tidak menentu.

Sebagai alat kontrol ekonomi, kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah untuk memengaruhi permintaan agregat melalui perubahan dalam pengeluaran dan penerimaan negara. Ketika ekonomi mengalami resesi atau peningkatan pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, jika terjadi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk menekan permintaan, sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang.

Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal utama yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer atau subsidi (Aqmarina & Furqon, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Pajak (*Taxes*): Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan instrumen yang sangat efektif untuk mengendalikan perekonomian. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan permintaan agregat, yang berguna untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli dan mendorong pengeluaran, yang akan mendorong pembangunan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran.
2. Pengeluaran Pemerintah (*Government Spending*): Pengeluaran pemerintah mencakup berbagai belanja, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Peningkatan belanja pemerintah berdampak pada peningkatan permintaan agregat dan stimulasi pertumbuhan ekonomi, yang keduanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pengurangan pengeluaran pemerintah dapat menekan permintaan agregat, yang sering digunakan untuk menurunkan inflasi.
3. Transfer dan Subsidi (*Transfers and Subsidies*): Transfer adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, seperti bantuan sosial, pensiun, dan program kesejahteraan lainnya. Subsidi adalah bantuan langsung kepada sektor-sektor tertentu, seperti pangan atau energi, untuk mengurangi harga produk tertentu di pasar. Transfer dan subsidi berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah, serta menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok. Dalam situasi resesi, peningkatan subsidi dan transfer dapat membantu menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi, sementara pengurangan subsidi dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan menurunkan permintaan pada sektor tertentu.

Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Fiskal

Dua alat utama untuk mencapai stabilitas ekonomi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Meskipun memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda, keduanya saling terkait dan berdampak pada hasil ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan fiskal, yang dilakukan oleh pemerintah, berfokus pada pengaturan anggaran, termasuk pendapatan pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter, yang dilakukan oleh bank sentral, terutama berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat tercipta ketika

kebijakan fiskal dan moneter selaras satu sama lain (Handoko et al., 2023).

Upaya untuk mengelola pengangguran dan inflasi seringkali melibatkan interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal. Misalnya, bank sentral mungkin perlu memodifikasi kebijakan moneter untuk menghindari tekanan inflasi jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran publik untuk menciptakan lapangan kerja. Meskipun hal ini dapat mengurangi efek menguntungkan dari kebijakan fiskal terhadap penciptaan lapangan kerja, bank sentral dapat menaikkan suku bunga dalam skenario ini untuk mengelola inflasi. Oleh karena itu, mencapai tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tanpa saling menghambat membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah dan bank sentral.

Kebijakan moneter dan fiskal bahkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dalam keadaan ekonomi tertentu. Misalnya, untuk meningkatkan permintaan agregat selama resesi atau ketika pengangguran tinggi, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif dengan memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran. Untuk memperluas pasokan uang, bank sentral dapat secara bersamaan menurunkan suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka. Dengan mendorong investasi dan konsumsi, kombinasi kebijakan ini pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, terdapat tantangan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal karena keduanya sering memiliki prioritas yang berbeda. Kebijakan fiskal cenderung bersifat politis dan fokus pada pertumbuhan jangka pendek serta kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada stabilitas harga dalam jangka panjang. Ketidaksesuaian antara kedua kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, jika kebijakan fiskal terlalu ekspansif dalam situasi ekonomi yang sudah penuh tenaga kerja, kebijakan tersebut dapat memicu inflasi tinggi yang sulit dikendalikan oleh kebijakan moneter. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah dan bank sentral dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter.

Definisi Pengangguran, Pendapatan Nasional, dan Inflasi

Salah satu metrik penting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara adalah pengangguran. Situasi ini muncul ketika sebagian angkatan kerja menganggur meskipun mereka mampu dan termotivasi untuk bekerja. Ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat terpengaruh oleh pengangguran. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi adalah untuk menjaga tingkat pengangguran tetap terkendali (Utami, 2020).

Pendapatan nasional mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB), sebagai ukuran aktivitas ekonomi, sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, penurunan pendapatan nasional menandakan perlambatan ekonomi. Akibatnya, pendapatan nasional merupakan metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan ekonomi (Purnamasari, 2024).

Kenaikan harga barang dan jasa yang meluas dan berkelanjutan dari waktu ke waktu dikenal sebagai inflasi. Daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat menurun akibat inflasi yang tinggi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan lemahnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, menjaga tingkat inflasi tetap stabil merupakan tujuan penting dalam kebijakan ekonomi. Stabilitas inflasi sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian dalam kegiatan ekonomi (Meiditambua et al., 2023).

Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pengangguran

Melalui berbagai mekanisme transmisi ekonomi, kebijakan moneter secara signifikan memengaruhi pengangguran. Penurunan suku bunga oleh bank sentral membuat pinjaman menjadi lebih murah, yang mendorong investasi. Investasi yang lebih banyak akan meningkatkan output di sejumlah sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengangguran dapat dikurangi melalui kebijakan moneter ekspansif. Peningkatan jumlah uang beredar juga dapat meningkatkan konsumsi publik. Permintaan terhadap produk dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi. Bisnis termotivasi untuk meningkatkan produksi karena meningkatnya permintaan ini. Dalam proses tersebut, perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran dapat berkurang secara bertahap.

Di sisi lain, tingkat pengangguran dapat meningkat sebagai akibat dari kebijakan moneter

kontraktif yang bertujuan untuk mengurangi inflasi. Bisnis akan kesulitan meminjam jika suku bunga naik. Akibatnya, investasi dapat menurun, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja akan menurun seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi, yang cenderung meningkatkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter seringkali harus memilih antara mendorong ekspansi ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Penurunan inflasi melalui kebijakan kontraktif dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dalam jangka pendek. Sebaliknya, kebijakan ekspansif dapat menurunkan pengangguran tetapi berisiko meningkatkan inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar kedua tujuan tersebut dapat tercapai. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam mengatasi dilema tersebut (Setiowati & Nugroho, 2021).

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pengangguran

Melalui penyesuaian pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan, kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan permintaan agregat, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisnis akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar ketika permintaan meningkat, sehingga menciptakan peluang kerja tambahan. Oleh karena itu, pengangguran dapat dikurangi dengan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang menurunkan pajak juga dapat meningkatkan daya beli. Konsumsi produk dan jasa didorong oleh peningkatan daya beli. Sektor riil akan menghasilkan lebih banyak sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi. Bisnis akan membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengimbangi peningkatan produksi. Akibatnya, tingkat pengangguran dapat diturunkan.

Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraktif dapat menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran atau mengelola inflasi. Namun, permintaan agregat dapat menurun jika pengeluaran pemerintah dipotong. Akibatnya, produktivitas dan permintaan tenaga kerja dapat menurun. Akibatnya, tingkat pengangguran dapat meningkat. Efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Pada saat ekonomi mengalami resesi, kebijakan fiskal ekspansif sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Namun, pada kondisi ekonomi yang terlalu panas, kebijakan fiskal perlu dikendalikan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan situasi ekonomi yang dihadapi. Fleksibilitas kebijakan menjadi hal yang sangat penting (Wijaya, 2019).

Dampak Pengangguran terhadap Pendapatan Nasional

Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan nasional suatu negara. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang tidak produktif. Hal ini menyebabkan output yang dihasilkan dalam perekonomian menjadi lebih rendah. Penurunan output akan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan nasional. Dengan demikian, pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, lebih banyak pekerja akan berpartisipasi dalam proses produksi jika tingkat pengangguran menurun. Produksi barang dan jasa akan meningkat seiring pertumbuhan angkatan kerja. Pendapatan nasional total akan meningkat sebagai hasilnya. Kesejahteraan sosial akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan negara. Dengan demikian, salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi adalah menurunkan pengangguran. Hubungan antara pengangguran dan pendapatan nasional juga dijelaskan oleh gagasan kesenjangan produksi. Kesenjangan output terjadi ketika output aktual berada di bawah output potensial. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Dengan menurunkan pengangguran, output aktual dapat mendekati output potensial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan (Kurniawan et al., 2021).

Dampak Pengangguran terhadap Inflasi

Konsep kurva Phillips dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Tingkat pengangguran dan inflasi memiliki hubungan terbalik dalam jangka pendek. Tekanan upah meningkat ketika pengangguran menurun. Peningkatan biaya produksi akibat kenaikan upah dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Di sisi lain, meningkatnya pengangguran mengurangi tekanan upah, yang menyebabkan biaya produksi relatif stabil atau menurun. Akibatnya, inflasi dapat ditekan. Namun, stabilitas jangka panjang dalam hubungan ini tidak selalu terjamin. Hubungan antara pengangguran dan inflasi juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Stagflasi dapat terjadi dalam perekonomian dalam keadaan tertentu. Ketika inflasi dan pengangguran sama-sama tinggi, situasi tersebut dikenal sebagai stagflasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi tidak selalu sederhana. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini,

diperlukan kebijakan yang tepat (Kurniawan et al., 2021).

SIMPULAN

Jelas dari perdebatan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran ekonomi. Kebijakan moneter dapat memengaruhi investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya memengaruhi lapangan kerja, dengan mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar. Sementara itu, kebijakan fiskal dapat meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Menurunkan tingkat pengangguran akan meningkatkan pendapatan nasional dan output ekonomi. Akibatnya, penerapan kebijakan ekonomi yang bijaksana dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja ekonomi.

Selain itu, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran dan inflasi, dengan kecenderungan jangka pendek menuju hubungan terbalik. Cara kebijakan moneter dan fiskal berinteraksi menunjukkan betapa pentingnya koordinasi yang efektif untuk mencegah konflik antara program-program yang diimplementasikan. Peningkatan pengangguran atau inflasi adalah dua contoh bagaimana ketidakseimbangan kebijakan dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang responsif, fleksibel, dan seimbang diperlukan untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Secara umum, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kerja sama kebijakan fiskal dan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, M., Lubis, M. M., Rahmayani, M. W., Kusumastuti, S. Y., Kusumawardhani, F., Juniartika, S., & Fathah, R. N. (2025). *Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia*. Jakarta: Star Digital Publishing.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 6(1), 12–20.
- Jalil, A., Kasnelly, S., & Agustia, I. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(II), 105–119.
- Kurniawan, B., Sunarya, S. R., Naofal, F., & Sudarjah, G. M. (2021). Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia Dan Korea. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(3), 120–130.
- Meiditambua, M. H., Centauri, S. A., & Fahlevi, M. R. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1), 17–26.
- Nasution, A. S., Amanda, E. L., Pasaribu, R. P., Fajri, M. Y., & Rinaldi, M. (2025). PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI JAWA TENGAH. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–22.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Pandiangan, L. O., Tua, V. M., Simanullang, A. M. V., & Sitepu, C. R. A. B. (2026). Determinasi Pengangguran Di Indonesia: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Suku Bunga. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 10728–10737.
- Purnamasari, B. (2024). Instrumen Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.
- Riofita, H. (2015). Strategi Pemasaran. In *Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra*.
- Riofita, H. (2022). Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions. *Muslim Business And Economic Review*, 1(2), 257–280.
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity And Risk Control Role On Willingness To Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151.
<https://doi.org/10.52813/JeI.V13i2.353>

- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation*, 1(4), 1–10.
- Setiowati, T. A. H., & Nugroho, R. Y. Y. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 55–63.
- Syah, T. A., & Aziz, J. A. (2020). Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Ala Syafruddin Prawiranegara. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 111–125.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
- Wijaya, K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Dan Pengangguran. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 1(1), 56–68.